



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman – Ohojang Kode Pos : 97614 email : bapendamalra@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – STANDAR PELAYANAN PUBLIK
= PAJAK HIBURAN =

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Biaya	Prosedur / Mekanisme	Produk	Ket
1.	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Pendaftaran	Pendaftaran Pajak Hiburan	- KTP Wajib Pajak (WP Baru) - Surat Keterangan Domisili Usaha (OP Baru) - Surat Izin Usaha (OP Baru)	15 Menit	-	- Calon WP atau kuasanya menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada Petugas Pendaftaran di Loker Pelayanan. - Setelah diperiksa dan diverifikasi, petugas melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru, jika tidak dokumen dikembalikan untuk dilengkapi. - Setelah terdaftar, WP akan mendapatkan NPWPD dan Kartu NPWPD. - Kepada WP yang telah terdaftar diberikan formulir Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hiburan untuk diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani.	- Kartu NPWPD - SPTPD Pajak Hiburan	-
2	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Pendataan	Pendataan Pajak Hiburan	- Kartu NPWPD - SPTPD Pajak Hiburan	15 Menit	-	- Petugas Pendataan memeriksa kebenaran dan kelengkapan SPTPD Pajak Hiburan yang diserahkan oleh WP, jika belum benar dan lengkap akan dikembalikan kepada WP. - Jika SPTPD sudah benar dan lengkap, Petugas Pendataan melakukan penginputan SPTPD kedalam database menggunakan aplikasi SIMPATDA.	(Database jumlah Pajak Hiburan yang Terhutang)	-
3	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Penetapan	Penetapan Pajak Hiburan	-	15 Menit	-	- Petugas Penetapan melakukan proses perhitungan dan penetapan Pajak Hiburan yang Terhutang menggunakan aplikasi SIMPATDA. - SPTPD yang telah diinput disimpan sebagai Arsip Bapenda. - Hasil penetapan dicetak dalam formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) Pajak Hiburan. - Petugas Penetapan memberikan SKPD Pajak Hiburan kepada pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk untuk ditandatangani. - Petugas Penetapan menyerahkan SKPD Pajak Hiburan (Lembar 1-2) yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi kepada WP untuk dilakukan pembayaran, (Lembar 3-4) disimpan sebagai Arsip Bapenda.	- Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah) - (Database jumlah ketetapan Pajak Hiburan)	SKPD dapat diakses secara online melalui website Bapenda -
4	Bendahara Penerimaan (Sekretariat Badan)	Pembayaran Pajak Hiburan	-	15 Menit	-	- WP setelah menerima SKPD SKPD Pajak Hiburan meneliti dengan saksama jumlah Pajak Terhutang yang telah ditetapkan. Apabila WP merasa keberatan atas jumlah tersebut, dapat mengajukan Keberatan/Permohonan keringan melalui Bidang Penagihan dan Keberatan. - Apabila jumlah Pajak Terhutang dianggap sesuai, WP melanjutkan ke ke pembayaran dengan menyerahkan SKPD Pajak Hiburan dan uang sebesar jumlah Pajak Terhutang yang tertera pada SKPD kepada Bendahara Penerimaan. - Bendahara Penerimaan melakukan penginputan data pembayaran Pajak Hiburan menggunakan aplikasi SIMPATDA. - Hasil pembayaran dicetak pada formulir Tanda Bukti Penerimaan (TBP) Pajak Hiburan, kemudian TBP ditandatangani oleh WP dan Bendahara Penerimaan. - Bendahara Penerimaan menyerahkan TBP yang telah ditandatangani	Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Pajak Hiburan	- Pembayaran juga dapat dilakukan melalui Bank (Teller, ATM). - TBP dapat diakses secara online melalui website Bapenda

						dan dibubuhi stempel resmi (Lembar 1) kepada WP, sedangkan (Lembar 2-4) disimpan sebagai Arsip Bapenda.		
5	Bidang Penagihan dan Keberatan / Sub Bidang Keberatan	Pengajuan Keberatan / Permohonan Keringanan atas Pajak Hiburan yang Terhutang	- Surat Keberatan / Permohonan Keringanan (harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta dilampiri data-data yang relevan). - SKPD Pajak Hiburan yang dimaksud.	1 hari kerja	-	- WP menyerahkan Surat Permohonan atas Pajak Hiburan yang Terhutang beserta SKPD Pajak Hiburan yang dimaksud kepada Petugas Pelayanan Keberatan. - Petugas Pelayanan Keberatan menerima dan mengagendakan surat permohonan tersebut beserta seluruh lampirannya, dan meneruskannya kepada Kepala Sub Bidang Keberatan untuk ditindaklanjuti. - Kepala Sub Bidang Keberatan mempelajari dan meneliti Surat Permohonan beserta lampirannya, setelah itu membuat catatan pertimbangan dan menyerahkannya kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.	Tanda Terima Laporan Keberatan	-
6	Bidang Penagihan dan Keberatan	Penanganan atas Pengajuan Keberatan / Permohonan Keringanan atas Pajak Hiburan yang Terhutang	- Surat Keberatan / Permohonan Keringanan beserta Lampirannya. - SKPD Pajak Hiburan yang dimaksud.	1 hari kerja	-	- Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan setelah menerima catatan pertimbangan atas keberatan/permohonan keringanan, dapat berkonsultasi dengan Kepala Badan Pendapatan sebelum memutuskan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). - Jika SK menyatakan permohonan ditolak, maka salinan SK tersebut diserahkan kepada WP untuk diketahui, dan WP tetap diwajibkan membayar sesuai jumlah yang tertera dalam SKPD. - Jika SK menyatakan permohonan diterima, maka salinan SK tersebut diserahkan kepada WP dan kepada Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan yang diteruskan ke Sub Bidang Penetapan untuk dilakukan perubahan atas SKPD Pajak Hiburan.	Surat Keputusan Menerima / Menolak Keberatan / Permohonan Keringan.	SKPD dapat diakses secara online melalui website Bapenda
7	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Penetapan	Perubahan SKPD Pajak Hiburan atas SK Keberatan / Permohonan Keringanan Pajak Hiburan yang Terhutang	Salinan SK Menerima / Menolak Keberatan / Permohonan Keringan.	15 Menit	-	- Sub Bidang Penetapan setelah menerima salinan SK Menerima Keberatan/Permohonan Pengurangan, melakukan proses penerbitan ulang atas SKPD Pajak Hiburan yang dimohonkan, dengan nilai Pajak Terhutang sesuai yang tertera dalam SK. - SKPD perubahan tersebut di serahkan ke WP untuk dilakukan pembayaran.	SKPD Pajak Hiburan (perubahan)	-
8	Bidang Penagihan dan Keberatan / Sub Bidang Penagihan	Penagihan atas SKPD Pajak Hiburan yang belum dibayar / tunggakan	Catatan / Register Tunggakan Pajak Hiburan	Relatif	-	- Sub Bidang Penagihan melakukan upaya-upaya penagihan atas tunggakan SKPD Pajak Hiburan yang telah jatuh tempo. - Hasil penagihan disetor ke Bendahara Penerimaan (1x24 jam) melalui prosedur/mekanisme Pembayaran Pajak Hiburan. - Tanda Bukti Pembayaran atas penyeteroran tersebut di kembalikan kepada WP	-	-
9	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembukuan atau Pencatatan atas Ketetapan dan Pembayaran (Realisasi) Pajak Hiburan	SKPD dan TBP Pajak Hiburan	10 menit per SKPD/TBP	-	- Sub Bidang Pembukuan menerima salinan SKPD (lembar 4) dari Sub Bidang Penetapan, serta dan salinan TBP (lembar 3) dari Bendahara Penerimaan, kemudian melakukan pembukuan atau pencatatan realisasi Pajak Hiburan. - Sub Bidang Pelaporan merangkum hasil pembukuan atau pencatatan Pajak Hiburan bersama dengan jenis Pajak dan Retribusi lainnya kemudian disajikan dalam Laporan Kepatuhan WP/WR dan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, untuk disampaikan kepada Stakeholder dan shareholder Pemerintah Daerah.	- Laporan Kepatuhan WP/WR - Laporan Relisasi PAD	- Pembukuan atau pencatatan juga dilakukan secara otomatis oleh aplikasi SIMPATDA. - Laporan Realisasi dapat diakses secara online melalui website

									Bapenda
10	Bidang Pengembangan dan Evaluasi	Pengkajian, evaluasi dan pengembangan potensi pendapatan daerah dari Pajak Hiburan	Regulasi terkait Pajak Hiburan	Relatif	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengembangan dan Evaluasi mem[ublikasikan dan mensosialisasikan regulasi Pajak Hiburan kepada publik/masyarakat. - Bidang Pengembangan dan Evaluasi menerima masukan/saran/usul dari berbagai pihak terkait pengelolaan Pajak Hiburan; - Sub Bidang Evaluasi melakukan pengkajian terhadap kemungkinan perubahan regulasi yang memungkinkan peningkatan pendapatan daerah dari Pajak Hiburan. - Sub Bidang Potensi dan Kebijakan menghimpun data dan merumuskan materi-materi yang berkaitan dengan perubahan terhadap regulasi Pajak Hiburan. - Sub Bidang Pengembangan menyusun rancangan regulasi perubahan Pajak Hiburan. 	Laporan Hasil Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Seluruh regulasi terkait pajak dan retribusi daerah diakses secara online melalui website Bapenda	



KEPALA BADAN

BRUNO OHOIWUTUN, S.Sos, M.Si

NIP. 196511031986031007